



Kolaborasi Pentahelix Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Tabanan

Disusun oleh

Andy Krisna | NPM 22010500012

Magister Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik

Dosen Pembimbing

Dr. Izzatusholekha, M.Si.

Ketua Sidang : Prof. Dr. Evi Satispi, S.P, M.Si.

Penguji 1 : Dr. Rahmat Salam, M.Si.

Penguji 2 : Dr. Izzatusholekha, M.Si.

Latar Belakang

1.

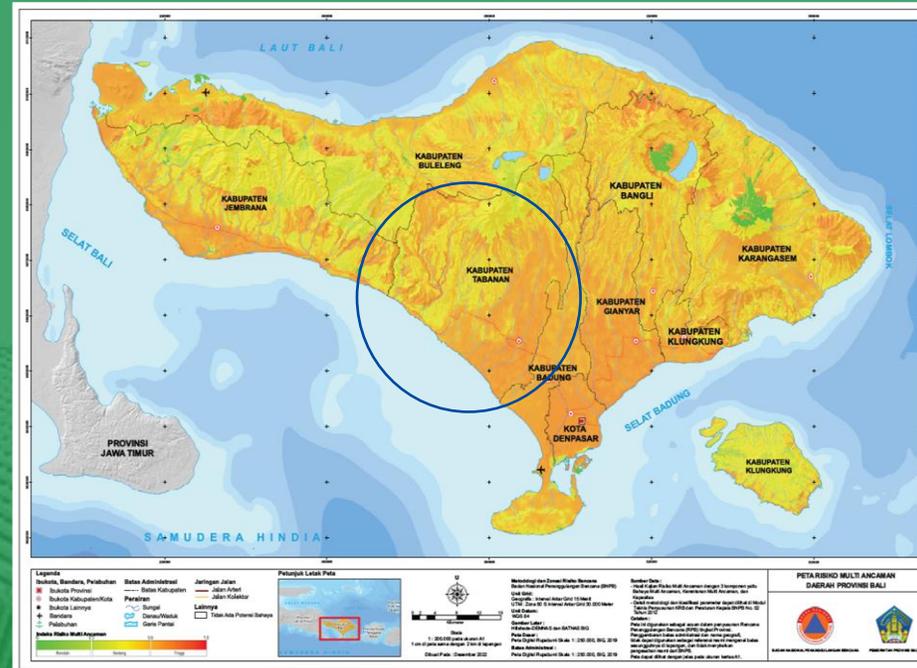
Indonesia adalah negara kedua paling berisiko bencana alam (**World Risk Report, Tahun 2023**). Indonesia memiliki tiga belas provinsi berisiko tinggi, dua puluh satu provinsi berisiko sedang, tidak ada provinsi yang berisiko rendah (**BNPB, 2022**). Kejadian bencana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan (**BNPB, 2023**).

2.

Bencana menimbulkan kehilangan nyawa, penyintas luka-luka, trauma, kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan terhambatnya pembangunan daerah (**Taslim et al., 2024**). Kerugian ekonomi akibat faktor bencana alam diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring perubahan iklim yang terjadi secara ekstrem (**Jazmi Adlan Bohari et al., 2021**).

3.

Provinsi Bali memiliki risiko bencana sedang. (**BPBD Bali, Bali Satu Data, 2019-2023**). Kabupaten Tabanan bagian dari Provinsi Bali, memiliki risiko bencana tinggi. Kejadian bencana alam di Tabanan terdiri bencana tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan memiliki potensi tsunami (**Laporan Tahunan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Tabanan**).



Peta Multi Ancaman Bencana Sumber: (BPBD Kabupaten Tabanan, 2024)

4.

Pengurangan risiko bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah sebagai *leading sector* (**Muhsin et al., 2023**). Pemerintah pusat mendorong keterlibatan aktif kolaborasi pentahelix di tingkat pusat dan pemerintah daerah untuk turut serta meningkatkan ketahanan menghadapi bencana alam. (**BNPB, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024**).

5.

Penanggulangan bencana dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan koordinasi berbagai pihak (**McNaught et al., 2024**). Pemerintah menerapkan pendekatan kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana dengan memberdayakan kearifan lokal, konteks lokal, serta unsur lima pemangku kepentingan yang terdiri pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media (**Pujiono Centre, 2022**). Keragaman pemangku kepentingan, dapat mendorong peningkatan kapasitas tata kelola kolaborasi (**Iao-Jørgensen, 2024**).

Latar Belakang

6.

Desa adat menjadi unsur kearifan lokal penting dalam melakukan penanggulangan bencana di Bali, termasuk di Tabanan. Kearifan lokal menjadi faktor kepentingan signifikan bagi upaya mengurangi risiko bencana alam (Kurnio et al., 2021). Desa adat diatur dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali

7.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan penanggulangan bencana alam dengan penyelarasan visi *Nangun Sat Kertih Loka Bali* yang berarti menjaga keselarasan alam dan seluruh isinya, untuk menciptakan krama (masyarakat) dan tanah Bali menjadi lebih sejahtera, mencakup budaya, adat, alam, dan manusia, sehingga dapat mengantisipasi dan menghadapi risiko bencana (BPBD Bali, 2021).

8.

Kabupaten Tabanan telah melakukan upaya penanggulangan bencana dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan.

10.

Pemerintah mendorong keterlibatan multi pihak untuk menghadapi risiko bencana. Pemerintah Tabanan membentuk FPRB melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1521/02/Hk/2021, dengan melibatkan unsur pentahelix, termasuk desa adat dan desa dinas. Pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan keterlibatan sektor swasta dalam kolaborasi masih perlu ditingkatkan (www.antarane.ws.com, 11 Mei 2023).

11.

Upaya tata kelola kolaboratif cenderung menunjukkan gejala paradoks, dimana proses kolaborasi menjadi unsur penting, namun sangat sulit untuk dijalankan (McNaught et al., 2024). Setiap wilayah memiliki berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda dan masalah yang erat, sehingga perlu dikaji lebih dalam, untuk menemukan hal baru di daerah lain. (Sakya et al., 2023).



Kejadian tanah longsor, dengan korban jiwa wisatawan asing di Desa Jatiluwih, dan Pohon Tumbang di Tabanan. Sumber: BPBD Tabanan



Kegiatan Sosialisasi SPAB (Dokumentasi Peneliti)

Masalah Penelitian

1. Bagaimana proses kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana alam di Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana model kolaborasi yang tepat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Tabanan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana alam di Kabupaten Tabanan.
2. Merumuskan model kolaborasi yang tepat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Tabanan.



Tinjauan Pustaka

Kolaborasi Pentahelix

Kolaborasi merupakan upaya menyatukan banyak pihak dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi memerlukan berbagai pemangku kepentingan – baik individu maupun organisasi – yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Sakya et al., 2023)

Pentahelix sebagai teknik kolaboratif atau multi stakeholder adalah strategi yang menyatukan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan media untuk memecahkan masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan berbagai sektor dalam berbagi peran (Pasaribu et al., 2023).

Penanggulangan Bencana Alam

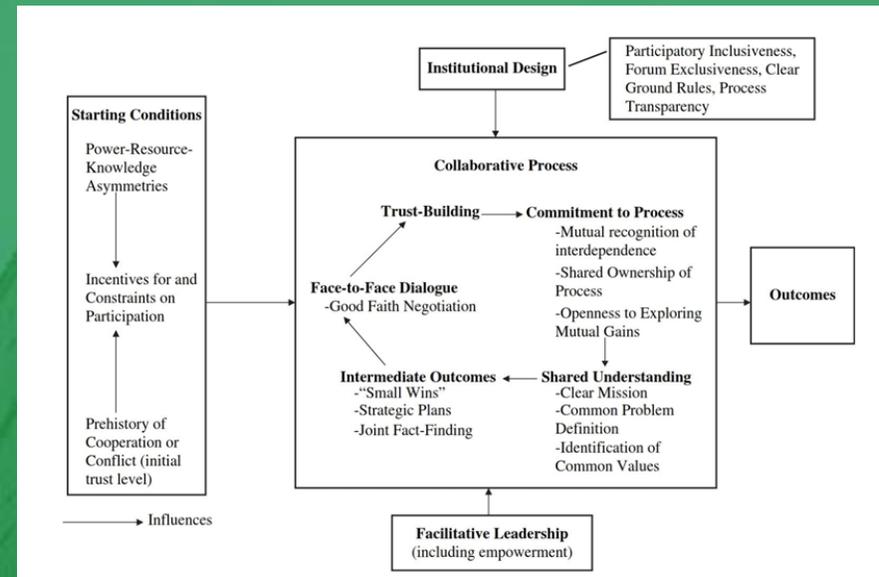
Penanggulangan Bencana mencakup upaya pemerintah menetapkan peraturan pembangunan yang memuat risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

(Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Teori Collaborative Governance Ansell dan Gash

Pelibatan aktor di luar pemerintahan dalam pengambilan kebijakan formal yang dilakukan secara kolektif melalui musyawarah (Noer & Putra, 2022)



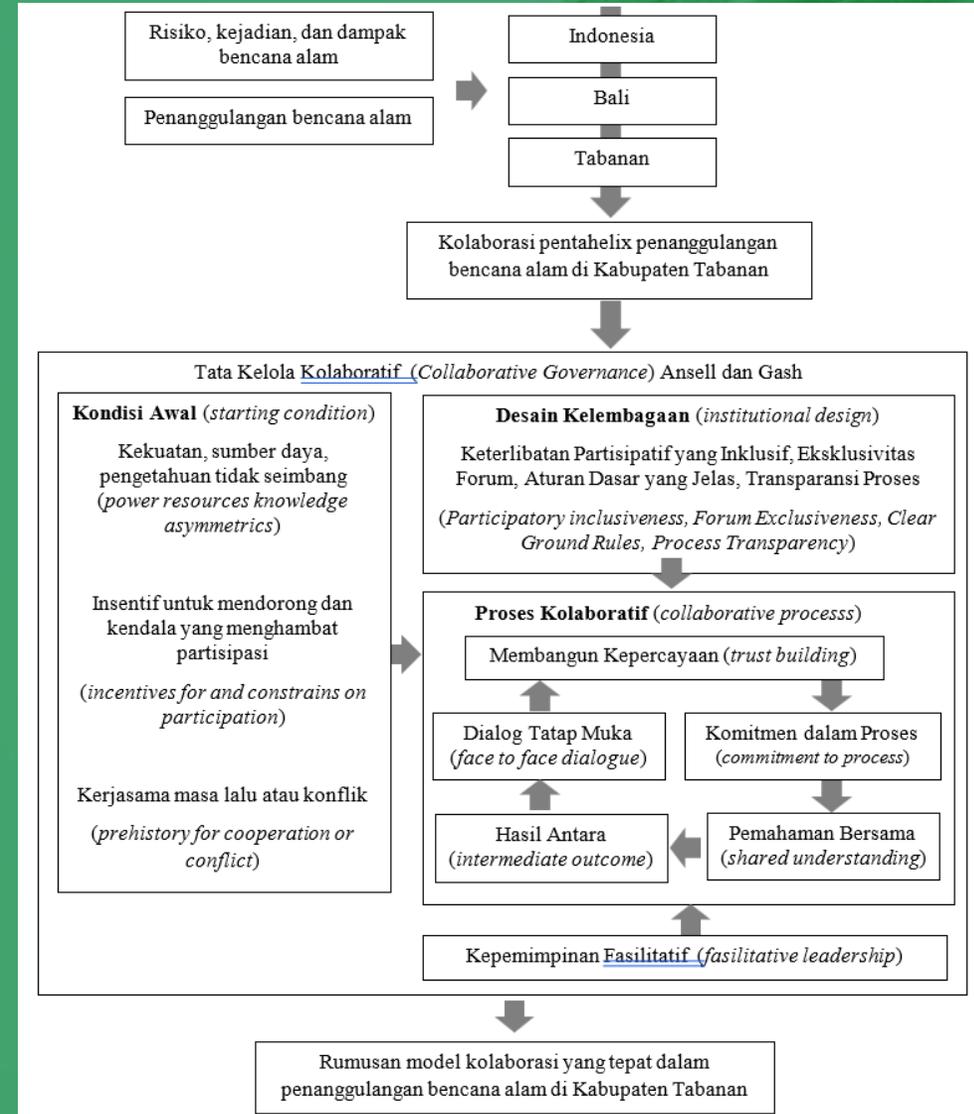
(1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif

Kerangka Berpikir



Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana oleh FPRB di Hotel WakaGangga

(Dokumentasi Peneliti)





Metodologi

Metode dan Jenis Penelitian	Sumber Data	Informan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Validitas Data	Analisa Data Kualitatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian eksploratif. Bertujuan untuk mengelaborasi kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer. Diperoleh dari informan, pelaku kolaborasi pentahelix melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2. Data sekunder. Data berupa bukti, catatan, atau laporan historis, arsip, dokumen, yang relevan dengan masalah kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana. 	<p>Informan kunci, yakni para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana. Dari unsur pemerintah, Masyarakat (desa adat), pelaku usaha, media, dan akademisi.</p>	<p>Peneliti menghimpun data secara langsung di kantor BPBD Tabanan, Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, lokasi masyarakat (desa adat) pelaku usaha, akademisi, dan media. Serta aktivitas yang berkaitan dengan kolaborasi pentahelix. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.</p>	<p>Validitas data dilakukan melalui Teknik triangulasi. Membandingkan data dari berbagai informan, dokumen, dan literatur, sehingga diperoleh kontruksi faktual yang relevan. Triangulasi mencakup sumber, metode, dan teori.</p>	<p>Model analisis Miles dan Huberman, interaktif khusus untuk penelitian kualitatif memungkinkan analisis data dilakukan saat peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan untuk dianalisis.</p>

Hasil dan Pembahasan



Desain Kelembagaan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan
3. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1521/02/HK/2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Forum Pengurangan Risiko Bencana
4. AD/ART Forum Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2024
5. Pedoman Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2024

Kondisi Awal

1. Pemahaman masyarakat terbatas saat terjadi bencana
2. Partisipasi relawan penanggulangan bencana dari organisasi yang berbeda
3. Keterbatasan personil di BPBD.



Kepemimpinan Fasilitatif

1. Memfasilitasi agenda diskusi dan rapat
2. Melibatkan Anggota FPRB dalam bimbingan teknis fasilitator
3. Kepemimpinan Sistem Kekeluargaan dengan melibatkan anggota FPRB sebagai narasumber pengurangan risiko bencana
4. Melibatkan desa adat melalui pecalang dalam DESTANA
5. Melibatkan sektor swasta
6. Melibatkan media
7. Melibatkan akademisi



1. Proses Kolaboratif Pembentukan FPRB melalui Keputusan Bupati

Hasil Antara:
Keberhasilan SPAB



Dialog Tatap Muka: Rapat Evaluasi SPAB



Membangun Kepercayaan: Rapat Evaluasi SPAB



Hasil Antara:
Menggerakkan pihak lain, menyiapkan narasumber, menambah teman searah, saling belajar, membentuk SDM berkualitas, kapasitas masyarakat meningkat, kesadaran masyarakat meningkat



Pemahaman Bersama:
Mengoptimalkan Gerakan FPRB ke Depan, dengan SK Bupati dan Pelibatan seluruh unsur pentahelix



Komitmen dalam Proses:
Melanjutkan Sosialisasi SPAB, Pembentukan DESTANA di wilayah pesisir dengan melibatkan FPRB

Hasil dan Pembahasan

2. Proses Kolaboratif Sosialisasi SPAB



3. Proses Pembentukan DESTANA

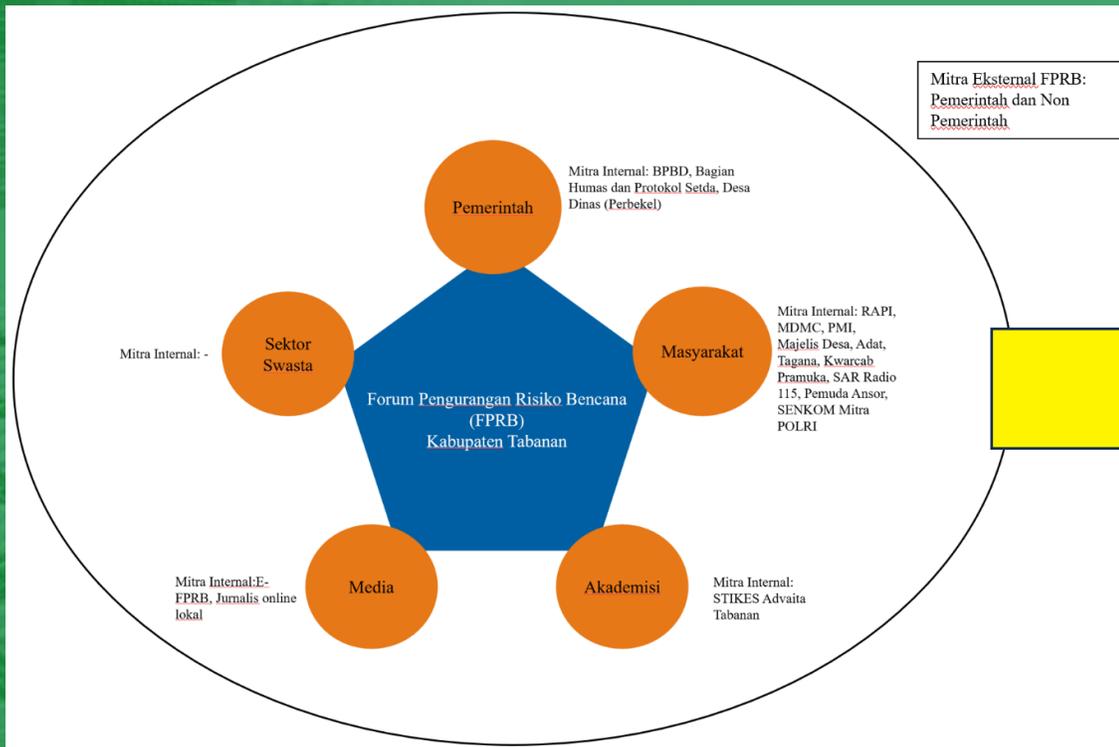


4. Proses Kolaboratif penyusunan AD/ART dan Pedoman Organisasi FPRB Tahun 2024

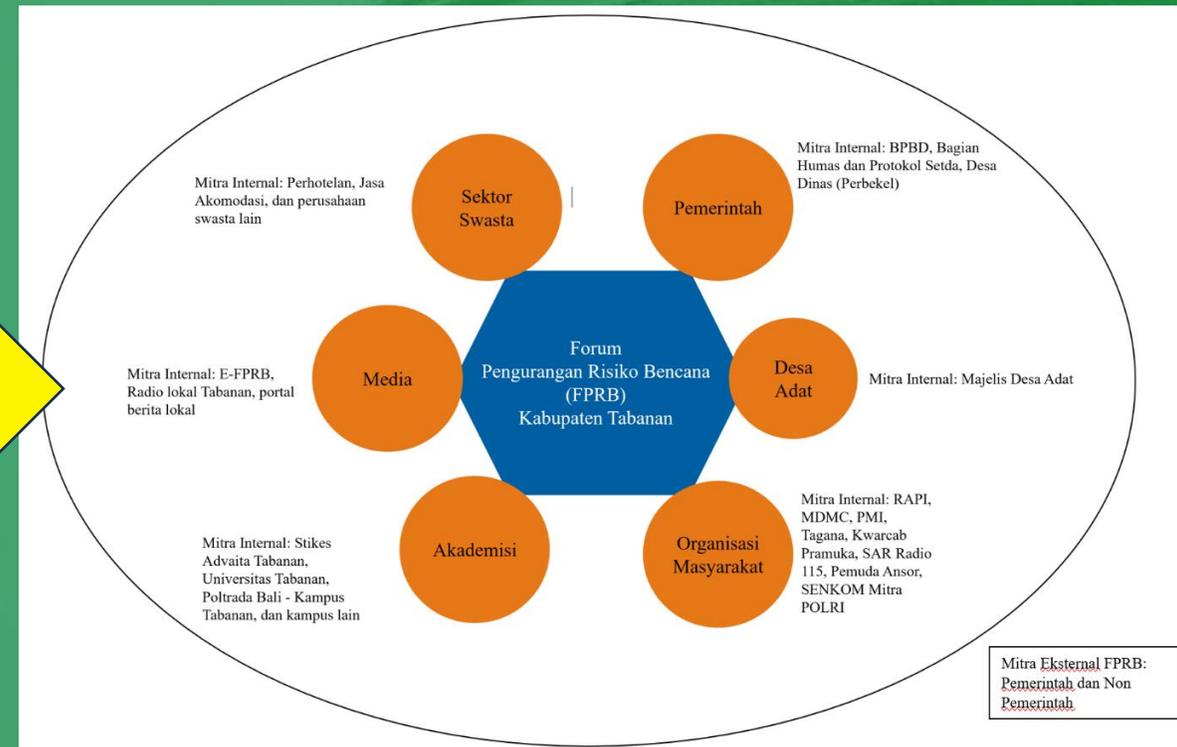


Hasil dan Pembahasan

Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Tabanan



Model Kolaborasi Hexahelix dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Tabanan



Sumber: Konstruksi Data Lapangan dan Penelitian Terdahulu

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kondisi awal dapat terjadi secara berulang jika proses mengalami kendala atau pasif.
2. Kepemimpinan kolaboratif melahirkan kepemimpinan kolektif, sehingga kepemimpinan tidak hanya didominasi pemerintah, tetapi ada keterlibatan pemangku kepentingan lain yang terlibat secara aktif.
3. FPRB sebagai penggerak inti kolaborasi pentahelix, akan melahirkan kolaborasi berkelanjutan di desa, lingkungan pendidikan, lingkungan perusahaan, sehingga proses kolaborasi melahirkan proses kolaborasi berikutnya secara berkelanjutan dan berulang.
4. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan terutama dari aspek metodologi, teori, cakupan masalah yang luas dan proses yang terus berkelanjutan, kondisi lapangan, dan informan, sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami.

Saran

1. Pelibatan perangkat desa adat secara keseluruhan dalam pengurangan risiko bencana
2. Merawat partisipasi relawan dari organisasi yang berbeda
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas dalam pengurangan risiko bencana.
4. Perlu dilakukan terobosan-terobosan seperti membuat area simulasi bencana gempa dengan pendekatan teknologi dan peluasan kolaborasi dengan kerjasama negara asing

Terima Kasih



Lokakarya Uji Publik AD/ART dan Pedoman Organisasi FPRB

(Dokumentasi Peneliti)